

Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

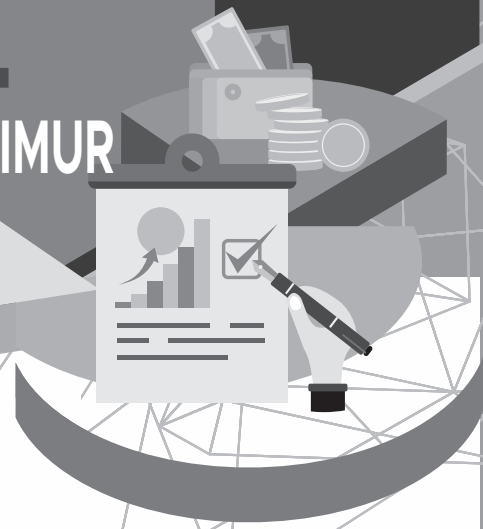


<https://kaltim.bps.go.id>

Potensi

USAHA MIKRO KECIL

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



**POTENSI USAHA MIKRO KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SENSUS EKONOMI 2016**

No. ISBN:
No. Publikasi: 64550.1809
No. Katalog: 9102067.64

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm
Jumlah Halaman: vi + 38 halaman

Naskah: Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Desain Kover oleh: Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tata Letak: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial

<https://kaltim.bps.go.id>

Kata Pengantar



Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Samarinda, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur

Ir. Atqo Mardiyanto, M.Si



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
PENDAHULUAN	1
UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI KALIMANTAN TIMUR	3
UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK	7
PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA	15
PELAKU UMK PERLU PENINGKATAN KAPABILITAS	21
KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN	27
PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG	33



Pendahuluan

Dunia usaha Indonesia pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016 Listing, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,33 persen dari total usaha nonpertanian di Indonesia. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Indonesia lebih dari 53 juta orang atau sekitar 76,28 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
KALIMANTAN TIMUR

Bagian

1

<https://kaltim.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kalimantan Timur. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu, aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai dasar pembangunan ekonomi kerakyatan.

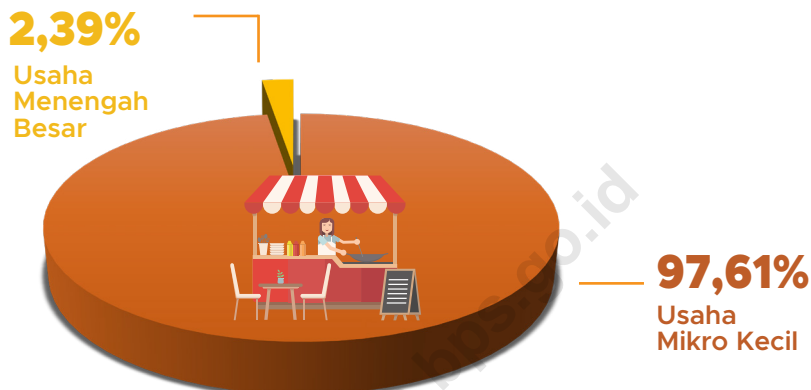
Persentase UMK di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 97,61 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang tercatat di Kalimantan Timur. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah 147 ribu usaha atau mencapai hampir 50 persen dari total UMK nonpertanian. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) juga memiliki kontribusi yang juga cukup besar dengan jumlah sekitar 64 ribu usaha atau sekitar 21,47 persen dari total UMK nonpertanian. Sedangkan kategori lainnya memiliki persentase jumlah UMK

kurang dari 10 persen. Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat melakukan strategi pemberdayaan UMK dengan lebih memfokuskan pada kedua kategori tersebut tanpa mengesampingkan kategori lainnya sehingga dapat meningkatkan perekonomian Kalimantan Timur dengan lebih efektif.

Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Samarinda menjadi pusat pergerakan ekonomi di Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah UMK nonpertanian di Kota Samarinda yang mencapai sekitar 79 ribu usaha atau mencapai 26,52 persen dari total UMK nonpertanian di Kalimantan Timur. Pada posisi kedua dan ketiga, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan merupakan dua wilayah dengan persentase jumlah UMK masing-masing sekitar 18 dan 17 persen di Kalimantan Timur. Letak geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang dekat dengan Kota Samarinda membuat kabupaten tersebut memiliki jumlah UMK yang cukup besar bahkan lebih tinggi dari Kota Balikpapan dengan selisih sekitar 1000 usaha. Sementara itu, Kota Balikpapan memiliki kemudahan akses baik darat, laut dan udara sehingga tingkat mobilitas di Balikpapan juga semakin tinggi dan memunculkan usaha-usaha baru.

UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI KALIMANTAN TIMUR

Gambar 1.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 1.
Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota, 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah	Persentase (%)
Paser	22 872	7,63
Kutai Barat	12 802	4,27
Kutai Kartanegara	54 414	18,14
Kutai Timur	23 897	7,97
Berau	16 681	5,56
Penajam Paser Utara	18 327	6,11
Mahakam Hulu	1 536	0,51
Balikpapan	53 376	17,80
Samarinda	79 541	26,52
Bontang	16 464	5,49
Kalimantan Timur	299 910	100,00

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 1.2.
Persentase Jumlah UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

<https://kaltim.bps.go.id>

Jumlah UMK yang sangat besar di Kalimantan Timur tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas dalam Publikasi Keadaan Pasar Tenaga Kerja 2017, pengangguran di Kalimantan Timur secara umum mencapai 6,91 persen. Berdasarkan pendidikannya, pengangguran terbanyak terdapat pada lulusan pendidikan menengah yang mencapai 9,71 persen. Pada umumnya, tingginya kontribusi lulusan menengah terhadap jumlah pengangguran di Indonesia, salah satu disebabkan rendahnya keahlian *soft skill* khususnya di SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji.

Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi upaya yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki *skill* tinggi. Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 690 ribu jiwa, atau lebih dari 67 persen tenaga kerja nonpertanian di Kalimantan Timur.

Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) lebih dari 280 ribu jiwa atau mencapai lebih dari 41 persen dari tenaga kerja pada UMK.

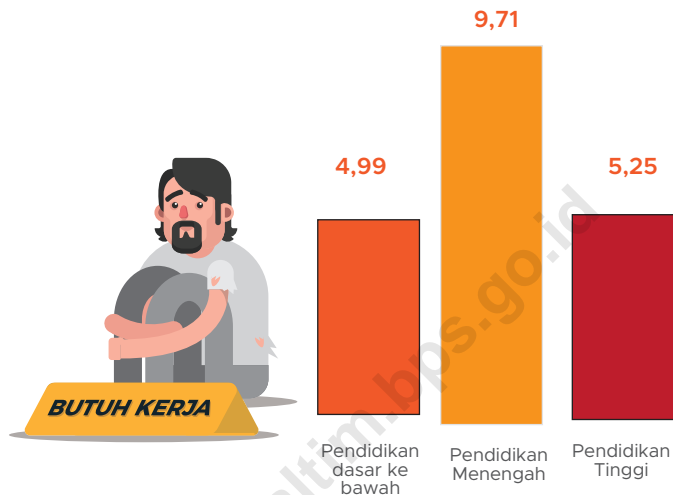
Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (kategori I) dan Usaha Pendidikan (kategori P) menempati urutan kedua dan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK dengan persentase masing-masing sekitar 18 persen dan 11 persen.

Secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Kalimantan Timur hanya sebesar 2 pekerja per usaha. Jika dirinci menurut kategori, UMK kategori Konstruksi (F) dan kategori Pendidikan (kategori P) sama-sama memiliki rata-rata penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 11 pekerja per usaha/perusahaan. Sedangkan, UMK dengan kategori Real Estat (L) memiliki rata-rata penyerapan tenaga kerja paling kecil yaitu sekitar 1 pekerja/usaha (umumnya adalah pemilik usaha itu sendiri).

Sebagai kota dengan jumlah UMK terbanyak, Kota Samarinda memiliki jumlah tenaga kerja UMK paling besar yaitu lebih dari 180 ribu jiwa atau sekitar 27 persen total pekerja UMK nonpertanian di Kalimantan Timur. Pada posisi kedua dan ketiga, Kota Balikpapan dan Kabupaten Kartanegara merupakan dua wilayah dengan persentase penyerapan tenaga kerja UMK masing-masing sebesar 17 persen.

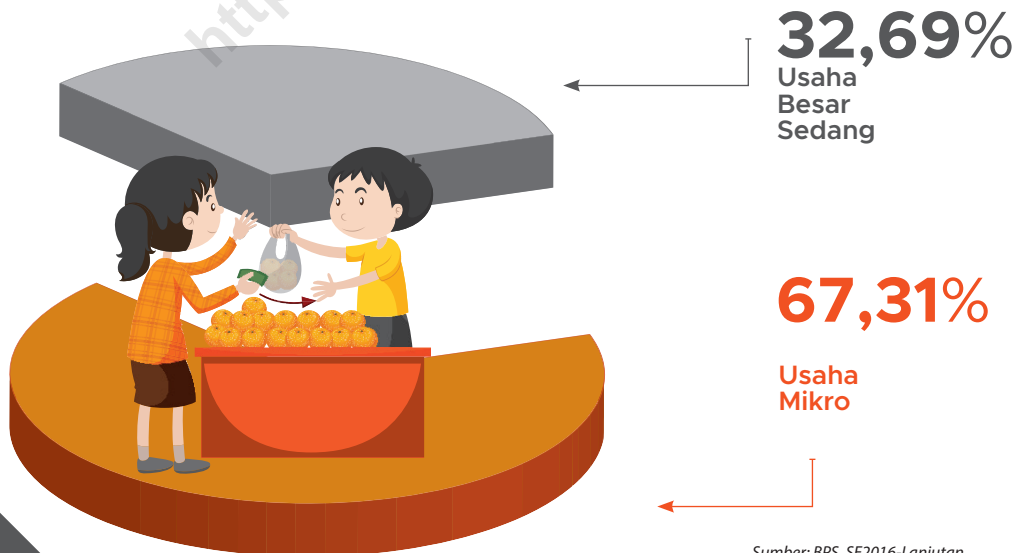
UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK

Gambar 2.1.
Tingkat Pengangguran Kalimantan Timur menurut Pendidikan,
2017



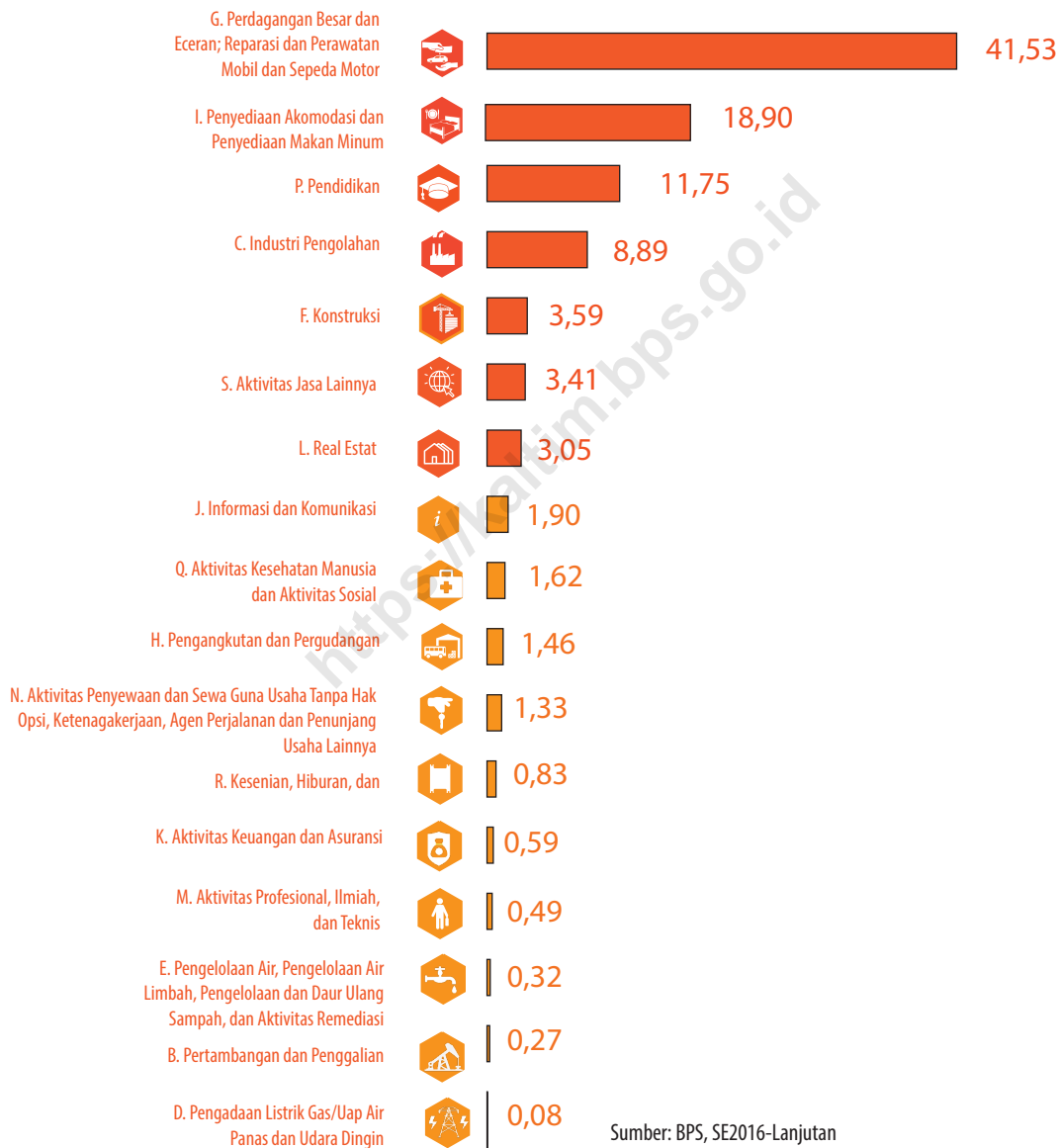
Sumber: BPS, Sakernas

Gambar 2.2.
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.3.
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-Rata Penyerapan Tenaga Kerja
UMK Nonpertanian Menurut Kategori di Provinsi Kalimantan Timur, 2017

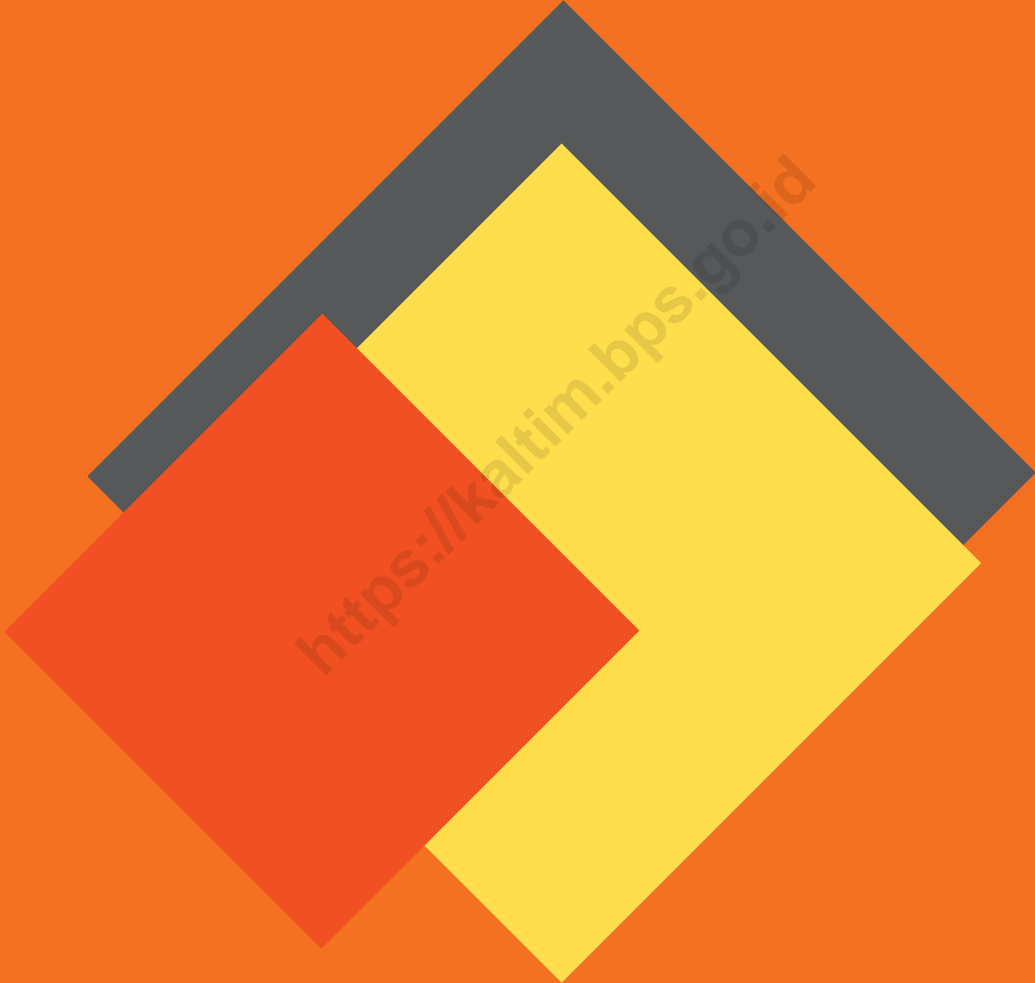
Kategori	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
B. Pertambangan dan Penggalian	666	1 868	3
C. Industri Pengolahan	25 999	61 510	2
D. Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	292	562	2
E. Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	1 112	2 224	2
F. Konstruksi	2 360	24 825	11
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	147 301	287 458	2
H. Pengangkutan dan Pergudangan	6 478	10 139	2
I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	64 400	130 782	2
J. Informasi dan Komunikasi	7 767	13 163	2
K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi	797	4 091	5
L. Real Estat	15 742	21 079	1
M. Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	903	3 404	4
N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	3 550	9 176	3
P. Pendidikan	7 646	81 323	11
Q. Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	2 042	11 179	5
R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	1 564	5 775	4
S. Aktivitas Jasa Lainnya	11 291	23 576	2
Total	299 910	692 134	2

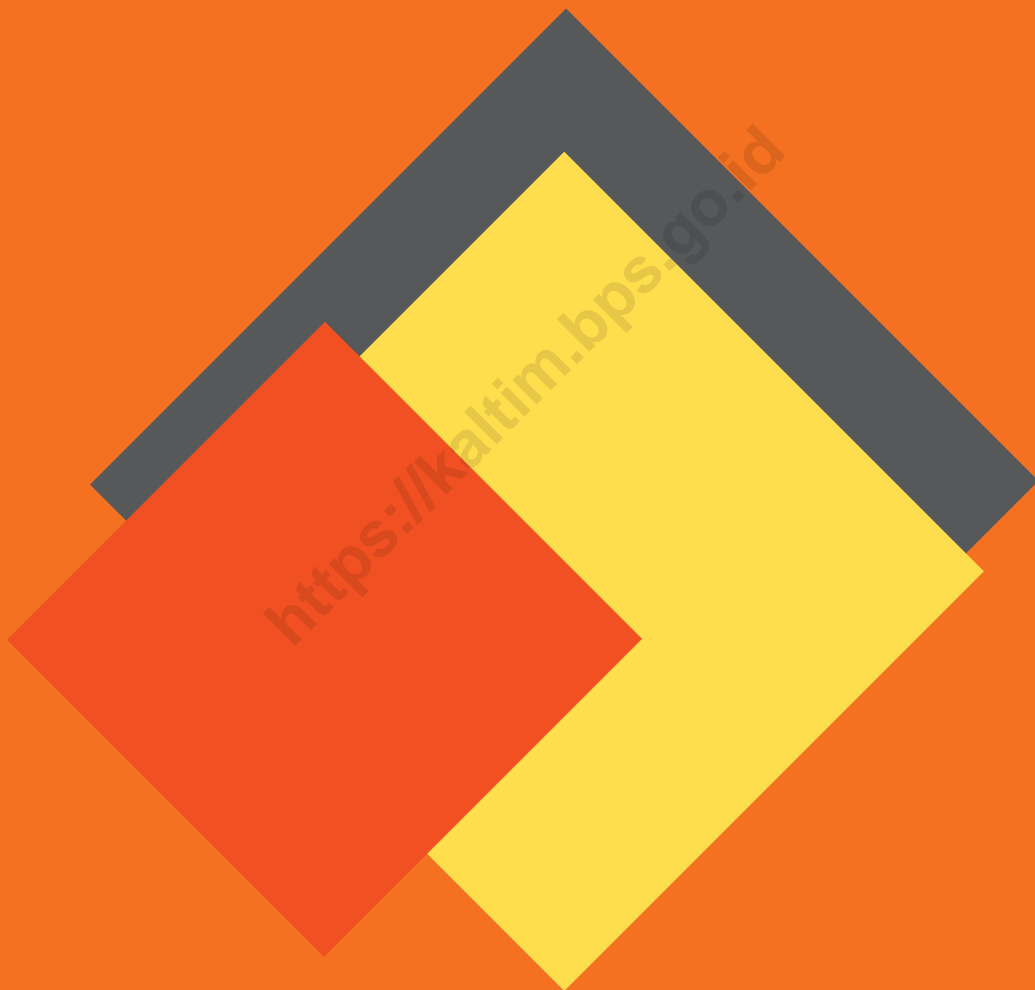
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2**Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja, Jumlah Usaha dan Rata-rata penyerapan Tenaga Kerja pada UMK Nonpertanian Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, 2017**

Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja (%)	Jumlah Usaha	Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja
Paser	52 725	7,62	22 872	2
Kutai Barat	32 293	4,67	12 802	3
Kutai Kartanegara	117 730	17,01	54 414	2
Kutai Timur	58 795	8,49	23 897	2
Berau	39 794	5,75	16 681	2
Penajam Paser Utara	37 794	5,46	18 327	2
Mahakam Hulu	5 040	0,73	1 536	3
Balikpapan	123 223	17,80	53 376	2
Samarinda	188 324	27,21	79 541	2
Bontang	36 416	5,26	16 464	2
Kalimantan Timur	692 134	100,00	299 910	2

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan





**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

<https://kaltim.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

Penyerapan tenaga kerja yang besar UMK di Indonesia memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

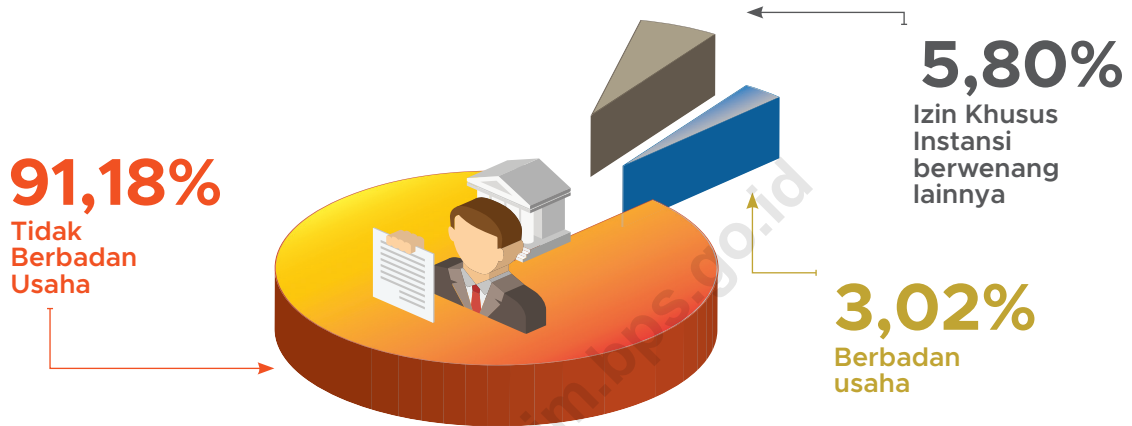
Data SE2016 Lanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana. Hal ini tercermin dari proporsi usaha yang memiliki status badan hukum belum mencapai 90 persen. Persentase terbesar UMK yang berstatus badan hukum terdapat pada kategori K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi) dengan persentase hanya sekitar 70 persen. Selain itu, mayoritas UMK juga belum terlalu banyak menggunakan komputer. Proporsi UMK yang menggunakan komputer dalam aktivitas usahanya masih dibawah 10 persen.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus

meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, upaya tersebut masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Tercatat hanya sekitar 7 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

Jika dibandingkan antar kategori, UMK pada kategori K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi) serta kategori P (Pendidikan) merupakan UMK dengan pengelolaan relatif paling baik di antara kategori lainnya. Besaran proporsi UMK pada kedua kategori tersebut cukup tinggi dalam hal status kepemilikan badan hukum, penggunaan komputer dan menjalin kemitraan. Oleh karena itu, UMK pada Kategori K dan P dinilai memiliki pengelolaan yang lebih baik dibandingkan UMK pada kategori lainnya.

Gambar 3.1.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Status Badan Hukum, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Pemanfaatan Internet dalam Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 3.
Persentase UMK yang Berbadan Usaha, Menggunakan Komputer,
Memanfaatkan Internet dan Menjalinkan Kemitraan, 2017

Kategori	Berbadan Hukum	Mempunyai Laporan Keuangan	Menggunakan Komputer	Menjalinkan Kemitraan
B Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,90	3,15	1,80
C Industri Pengolahan	9,36	7,74	12,49	7,96
D Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	15,75	64,73	62,67	29,45
E Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	6,83	4,41	8,63	9,80
F Konstruksi	31,86	33,43	35,25	16,06
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	7,03	5,73	9,38	7,68
H Pengangkutan dan Pergudangan	7,46	4,85	9,25	9,83
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4,26	2,18	6,17	3,46
J Informasi dan Komunikasi	5,81	31,30	40,44	11,91
K Aktivitas Keuangan dan Asuransi	71,02	64,24	42,66	21,46
L Real Estat	1,73	1,90	4,59	0,81
M Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	37,98	85,60	72,31	22,26
N Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	20,48	45,41	44,37	16,06
P Pendidikan	64,36	71,79	57,36	15,58
Q Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	52,30	34,18	35,50	16,41
R Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	17,39	26,41	23,21	4,60
S Aktivitas Jasa Lainnya	8,49	12,45	21,24	5,83
Total	8,82	8,95	12,36	7,03

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan





**PELAKU UMK
PERLU
PENINGKATAN
KAPABILITAS**

Bagian

4

<http://altim.bps.go.id>

Salah satu faktor keberhasilan suatu usaha adalah sumber daya manusia yaitu pelaku usaha yang merupakan tenaga kerja. Sebagian besar UMK dilakukan secara sederhana sehingga sebagian besar proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan oleh sendiri oleh pengelola atau pengusaha.

Disamping itu, masih banyak UMK yang dibantu oleh pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Hal ini terlihat dari hasil SE2016 Lanjutan dimana sekitar 20 persen pekerja UMK adalah pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Kategori yang paling banyak dibantu pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga adalah Kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor), Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum), dan Kategori J (Informasi dan Komunikasi).

Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 45 persen. Meskipun masih lebih rendah dari laki-laki, persentase

ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya norma jika laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

Secara umum, kualitas pendidikan pengelola UMK masih relatif rendah. Lebih dari setengah pengelola UMK berpendidikan SMP ke bawah. Sementara itu, pengelola dengan pendidikan SMA sederajat juga cukup besar, yaitu mencapai sekitar sepertiga dari total UMK non pertanian. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK merupakan tantangan bagi pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas SDM pelaku UMK. Salahsatu upaya yang dapat dilakukan terkait peningkatan kapasitas SDM pelaku UMK adalah dengan memberikan bantuan berupa pelatihan untuk mendorong produktivitas UMK.

PELAKU UMK
PERLU PENINGKATAN
KAPABILITAS

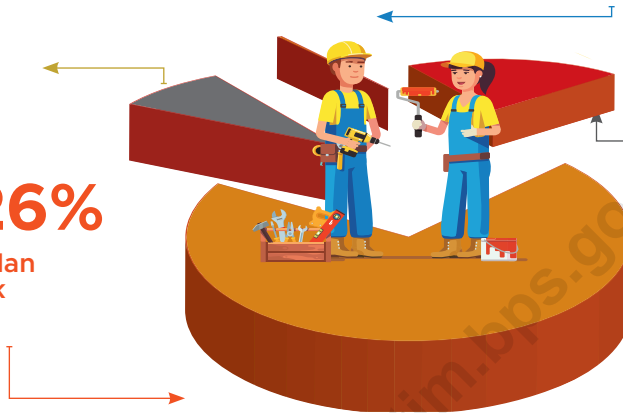
Gambar 4.1.
Persentase UMK Nonpertanian
Menurut Status Pekerjaan, 2017

8,11%
Tidak Tetap/
Harian

71,26%
Tetap dan
Kontrak

0,13%
Outsourcing

20,50%
Tidak Di
Bayar

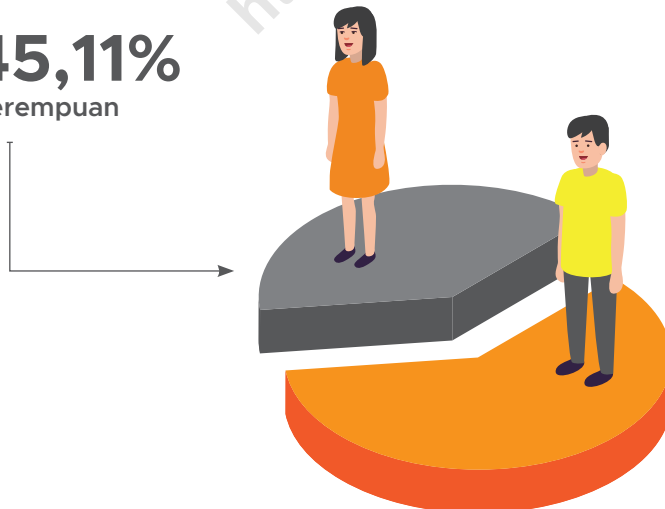


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.2.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Jenis Kelamin, 2017

45,11%
Perempuan

54,89%
Laki-laki



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.3.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian Menurut Pendidikan, 2017



Tabel 4.
Persentase UMK Nonpertanian Menurut Kategori dan Status Pekerja, 2017

Kategori	Tetap dan Kontrak	Tidak Tetap/harian/ Outsourcing	Tidak Dibayar/ Pekerja Keluarga
B Pertambangan dan Penggalian	57,28	35,55	7,17
C Industri Pengolahan	68,08	12,29	19,63
D Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin	75,27	5,34	19,40
E Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	77,88	10,48	11,65
F Konstruksi	32,10	66,43	1,47
G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	68,60	4,09	27,31
H Pengangkutan dan Pergudangan	82,56	10,86	6,58
I Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	68,86	4,95	26,18
J Informasi dan Komunikasi	72,44	1,69	25,88
K Aktivitas Keuangan dan Asuransi	75,68	2,62	21,71
L Real Estat	76,77	1,49	21,73
M Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	84,72	8,46	6,82
N Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	65,99	19,16	14,85
P Pendidikan	92,86	6,21	0,93
Q Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	91,75	3,67	4,58
R Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	51,08	33,37	15,55
S Aktivitas Jasa Lainnya	76,36	11,45	12,19
Total	71,26	8,25	20,50

Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan



**KINERJA
USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

5

<https://kaltim.bps.go.id>

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 2016 dibanding 2015 cenderung menunjukkan kondisi yang tetap dan menurun. Tercatat, sektor UMK secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Timur mampu menghasilkan pendapatan mencapai lebih dari Rp 72 triliun.

Selain laba usaha, *rasio cost to income* juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Pada gambar 3.1 dapat terlihat bahwa UMK pada kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan) dan kategori L (Real Estat) merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan rasio masing-masing sebesar 0,33 dan 0,36. Kedua kategori UMK tersebut mampu mendulang pendapatan hingga dua kali lipat biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya, Kategori J (Informasi dan Komunikasi) dan Kategori K (Aktivitas Keuangan dan Asuransi) merupakan jenis aktivitas usaha yang memiliki tingkat efisiensi paling rendah karena memberikan rasio pengeluaran terhadap pendapatan yang cukup tinggi dengan rasio masing-masing mencapai 0,75 dan 0,71.

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Timur ternyata memiliki rasio yang tidak jauh berbeda, yaitu kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan rasio paling rendah berada di Kota Bontang.

Kategori P (Pendidikan) memberikan balas jasa pekerja tertinggi dengan jumlah lebih dari 2 triliun rupiah walaupun jumlah tenaga kerjanya relatif lebih kecil dibanding kategori lain. Dengan demikian, rata-rata balas jasa pekerja untuk kategori P juga relatif lebih tinggi dibanding pekerja pada kategori lain. Selain itu, kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan) yang memiliki jumlah UMK serta tenaga kerja paling besar memberikan balas jasa pekerja sekitar 1,5 triliun rupiah, terbesar kedua setelah kategori P (Pendidikan). Sebaliknya, kategori yang memberikan total balas jasa pekerja paling kecil adalah kategori D (Pengadaan Listrik Gas/Uap Air Panas dan Udara Dingin) yaitu hanya sekitar 4 miliar rupiah.

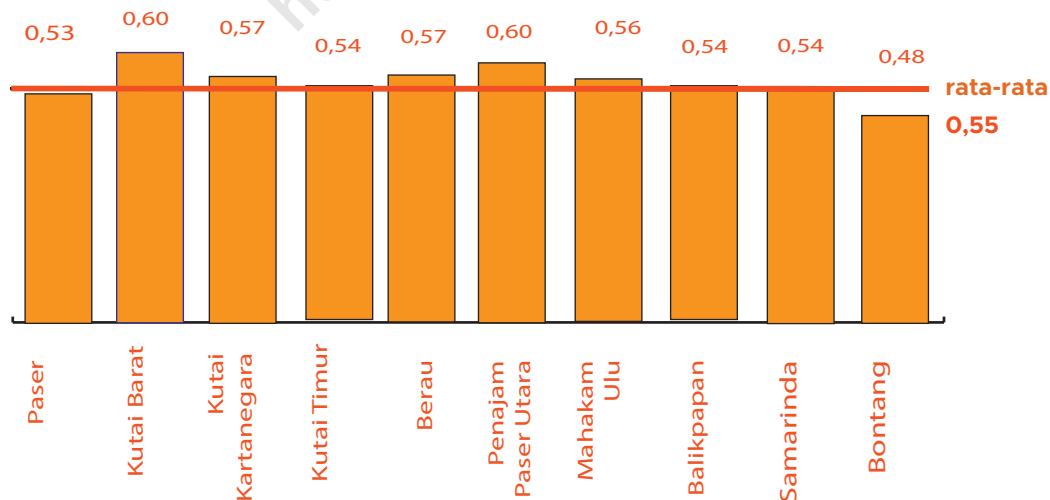
Jika dilihat berdasarkan wilayah kabupaten/kota, Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara menempati posisi paling tinggi dalam memberikan rata-rata balas jasa pekerja. Hal tersebut sejalan dengan jumlah UMK serta penyerapan tenaga kerjanya yang tinggi. Secara umum, total rata-rata balas jasa pekerja UMK nonpertanian di Kalimantan Timur adalah sekitar 20 juta rupiah.

Gambar 5.1.
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



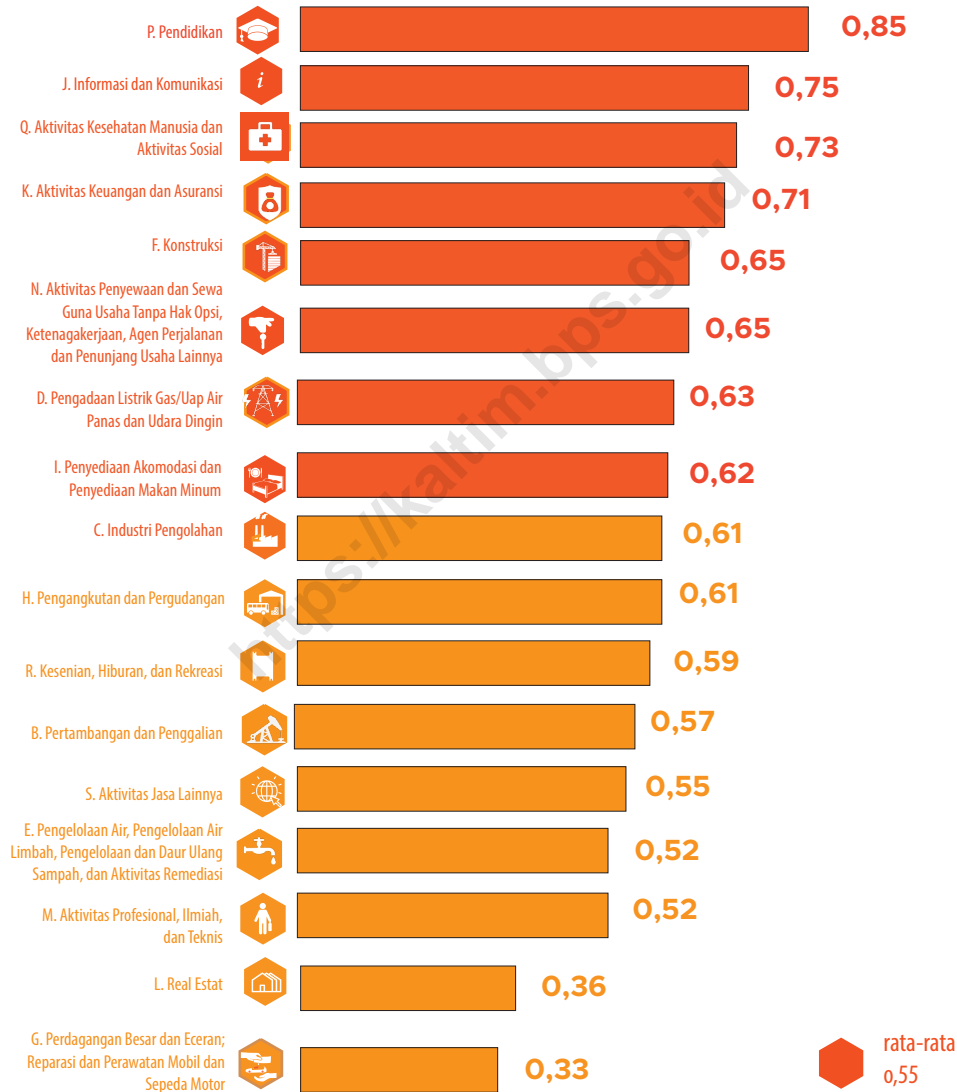
Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.
Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan menurut Kabupaten/Kota, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.3.
Rasio Pengeluaran terhadap Pendapatan menurut Lapangan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan





**PROSPEK
UMK DI
MASA
MENDATANG**

Bagian

6

<https://kaltim.bps.go.id>

RPJMN 2015-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, yang berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan, baik dari sisi perolehan keuntungan maupun omset. Persentase jumlah pengusaha atau pengelola UMK yang menyatakan bahwa usaha mereka akan menjadi lebih baik di masa mendatang adalah sekitar 40 persen.

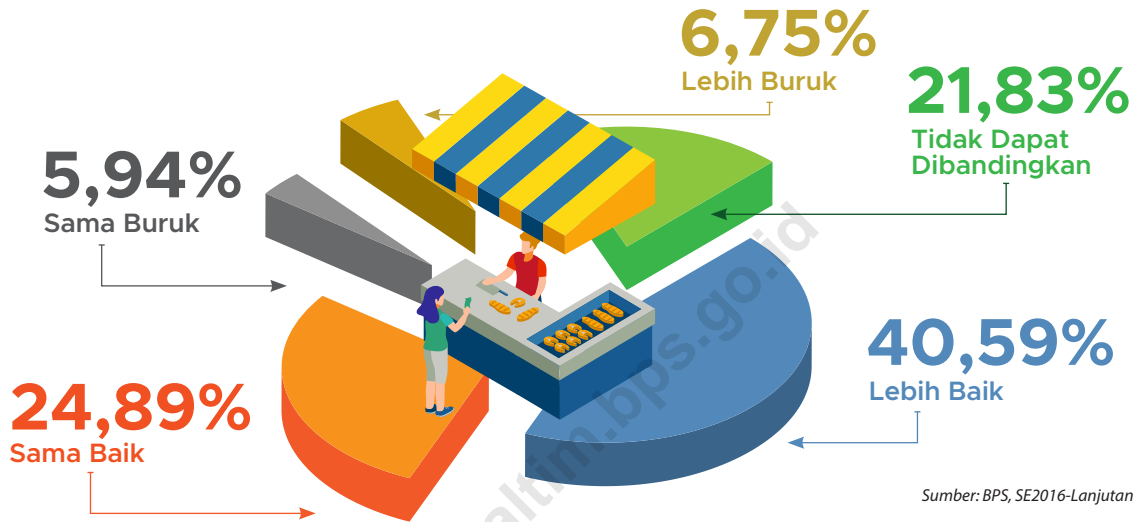
Agar kondisi bisnis ke depan menjadi lebih baik, tentunya diperlukan upaya untuk mengurangi kendala yang dihadapi. Namun hasil SE-2016 Lanjutan menunjukkan bahwa ternyata hanya sekitar 25 persen atau seperempat jumlah UMK non pertanian yang tidak memiliki kendala usaha, sedangkan sisanya mengaku memiliki kendala dalam menjalankan usahanya. Sebagian besar, atau sekitar 54 persen pengusaha, mengaku bahwa terdapat kendala dalam hal permodalan/likuiditas. Sementara itu, sekitar 57 persen pengusaha menyatakan bahwa persaingan antar usaha merupakan salahsatu kendala yang dihadapi mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar

UMK belum cukup memiliki daya saing dalam menjalankan kegiatan usahanya.

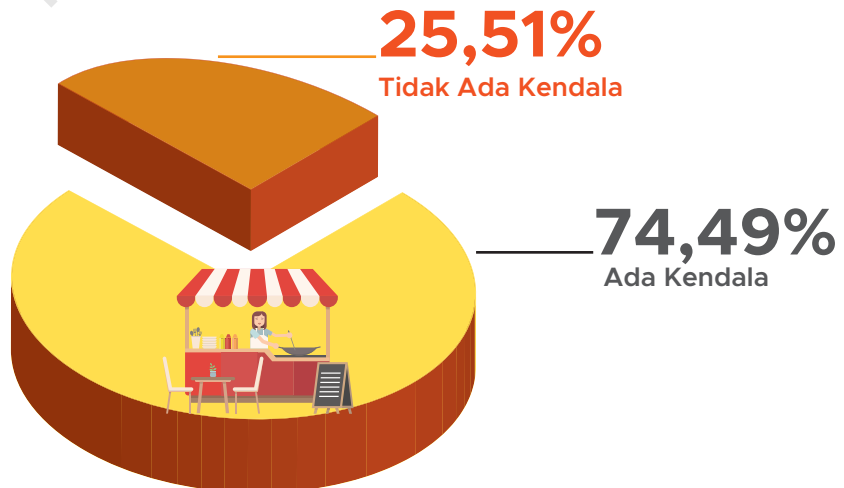
Dengan demikian, diharapkan kedepannya pemerintah dapat menyusun strategi/kebijakan terutama dalam hal permodalan seperti adanya pengawasan/peningkatan kemudahan akses permodalan khususnya untuk UMK. Selain itu, perlunya pengawasan yang lebih ketat agar menghindari munculnya kegiatan usaha yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, upaya pengembangan kapasitas pengelola UMK juga diperlukan sehingga pelaku UMK dapat melakukan inovasi dalam mengembangkan produknya serta menghasilkan output yang memiliki daya saing yang cukup tinggi.

**PROSPEK
UMK DI MASA
MENDATANG**

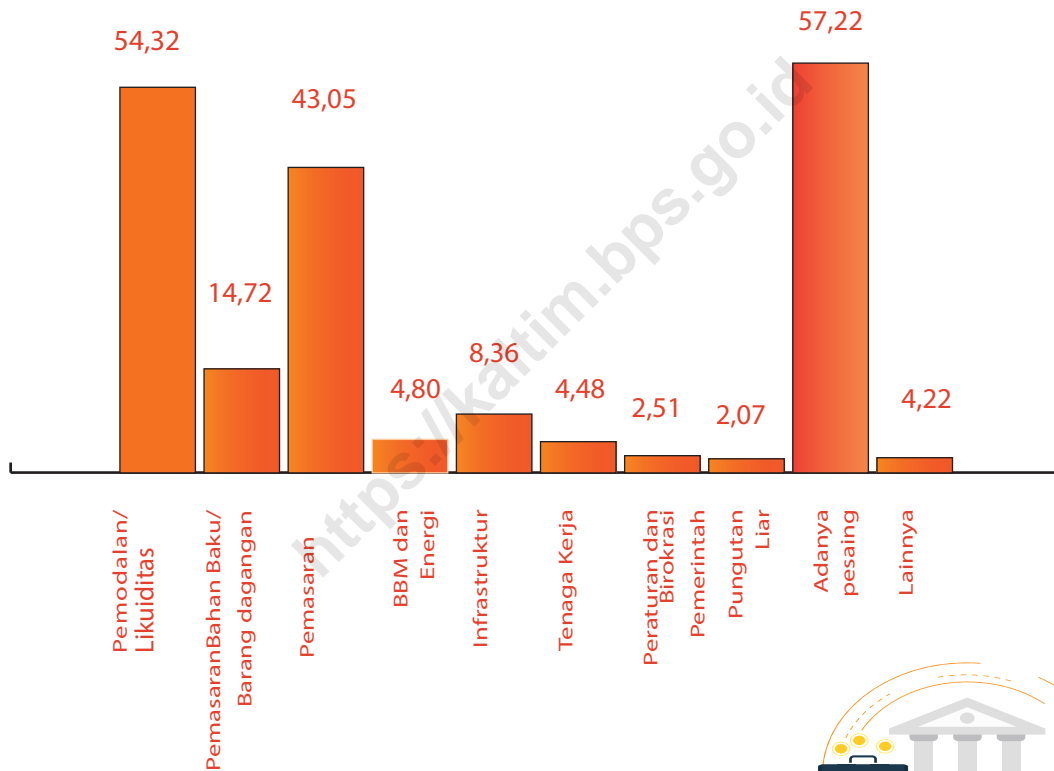
Gambar 6.1.
Persentase UMK Menurut Prospek UMK Mendatang



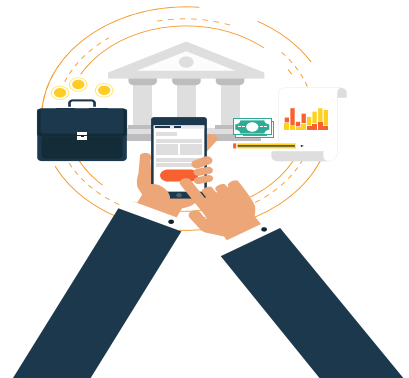
Gambar 6.2.
Persentase UMK Menurut Ada/Tidak Kendala Usaha, 2017

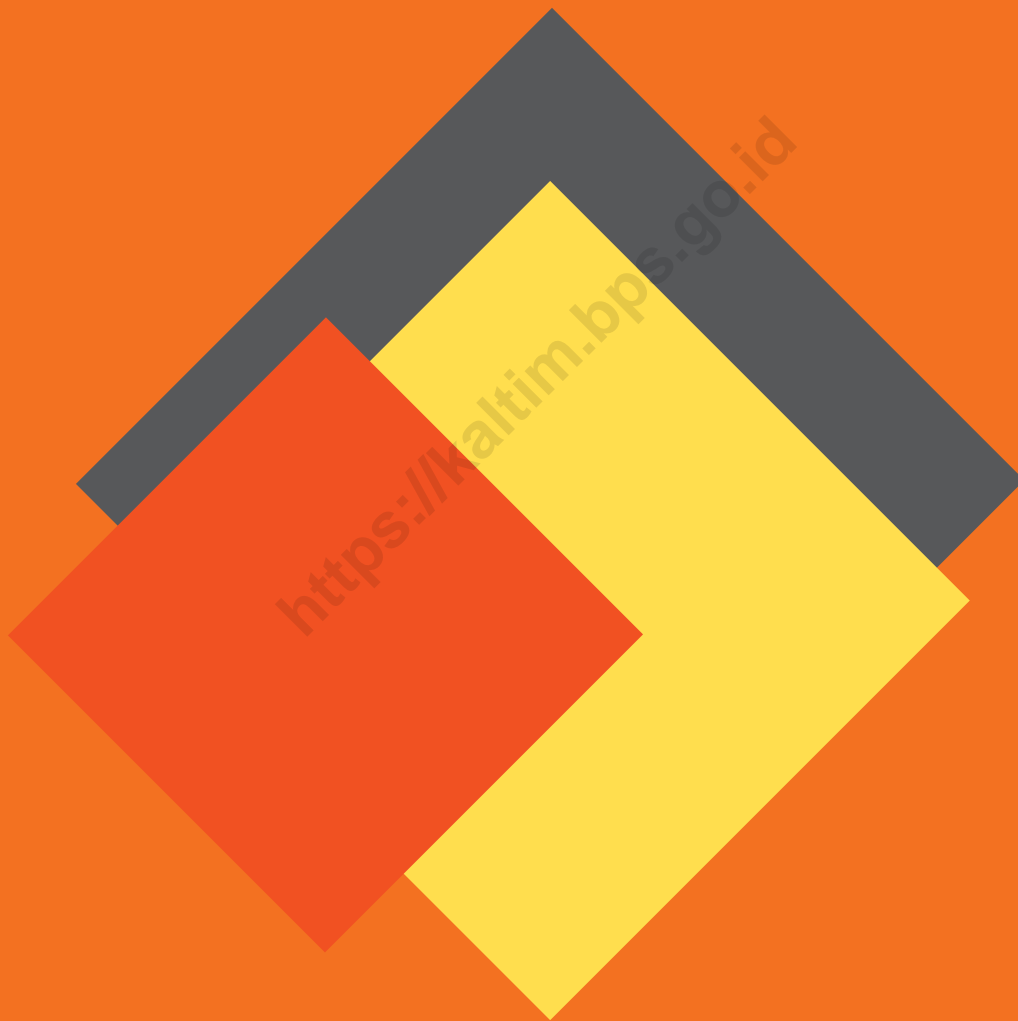


Gambar 6.3.
 Persentase UMK yang Memiliki Kendala Usaha berdasarkan Jenis Kendala Usaha, 2017

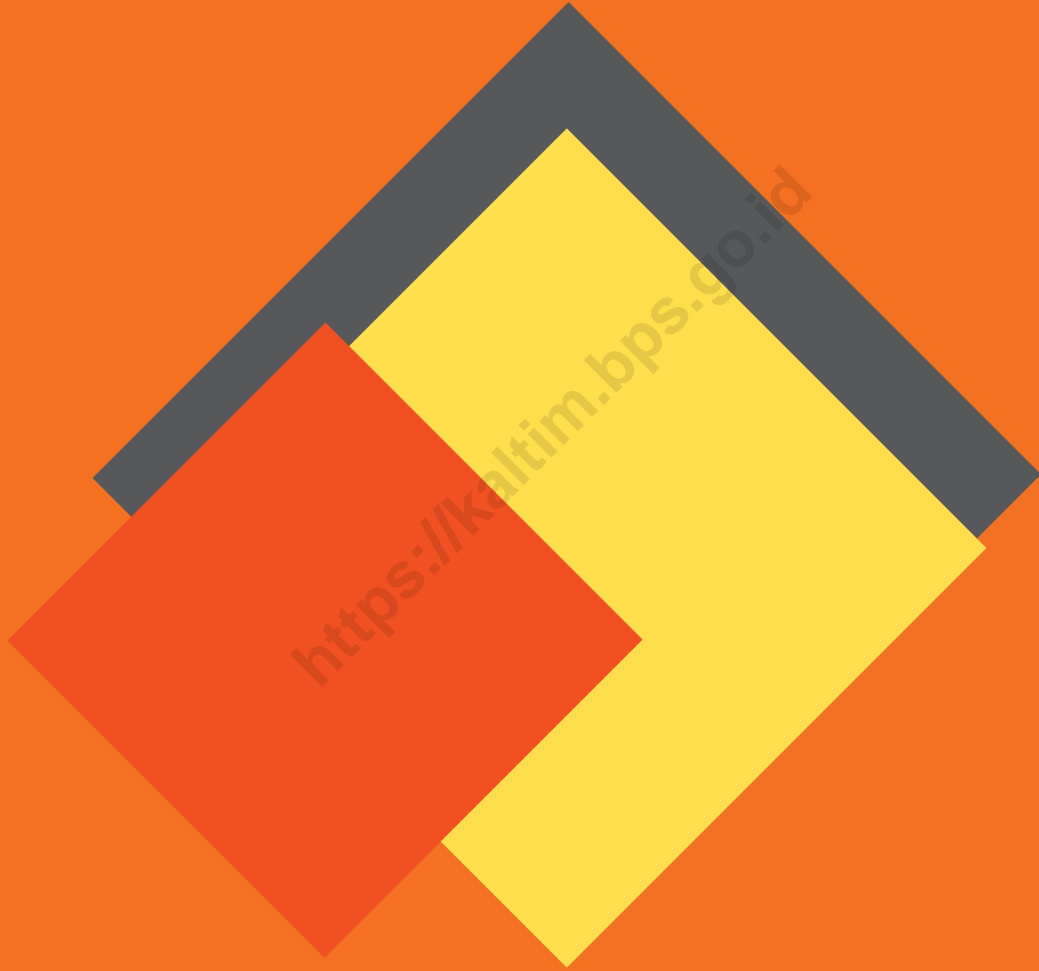


Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan









<https://kaltim.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. Kemakmuran No.4 Samarinda

Telp : (0541) 73293 Fax : (0541) 201121

Homepage : <https://www.kaltim.bps.go.id> E-mail : bps6400@bps.go.id